

RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Andi Zaelani^{1*}, Oti Kusumaningsih², Andri Trianfano³, Johar Mamuri⁴

¹ Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Indonesia

*Korespondensi : andritrianfanofisip@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat harus mampu berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Upaya pemerintah dalam penggunaan anggaran harus mampu mengedepankan anggaran yang *pro poor*, dimana anggaran pemerintah harus mampu secara bertahap mengetaskan kemiskinan dan upaya dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi seiring dengan berbagai pemanfaatan anggaran yang tidak direalisasikan semestinya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Rasio APBD dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen tahun 2022. Penelitian ini membahas bagaimana upaya pemerintah kabupaten Kebumen dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengalokasikan anggaran dan belanja daerah menggunakan metode *literatur review*. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa fakta yang menarik dimana sumber pendapatan pada APBD Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung pada keuangan bantuan keuangan dari pusat dan propinsi sehingga kemandirian APBD Kabupaten Kebumen masih sangat kecil. Campur tangan pemerintah pusat dalam aktivitas pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan otonomi daerah masih sangat besar. Keuangan daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar lebih banyak dibelanjakan untuk belanja operasional yang berhubungan dengan kegiatan secara langsung dalam berbagai bidang seperti pembangunan di berbagai sektor perencanaan sektor swasta perdagangan internasional dan sebagai politik anggaran untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Penanganan Kemiskinan

ABSTRACT

Development is the government's effort to improve the quality of community welfare, it must be oriented towards improving the economy of the community as a whole. The government's efforts in using the budget must be able to prioritize a pro-poor budget, where the government budget must be able to gradually alleviate poverty and efforts to increase economic empowerment along with various uses of the budget that are not properly realized. The purpose of this study was conducted to describe the APBD ratio in improving the economy in Kebumen Regency in 2022. reviews. The results of this study indicate some interesting facts where the source of income in the Kebumen Regency

APBD is still very dependent on financial assistance from the center and the province so that the independence of the Kebumen Regency APBD is still very small. Central government intervention in regional development activities in Kebumen Regency in implementing regional autonomy is still very large. Kebumen Regency's regional finances are mostly spent on operational expenditures that are directly related to activities directly in various fields such as development in various sectors, planing the privat sector, internasional trade and as a political budgetto reduce poverty.

Keywords : *Economic Development, Community Welfare, Poverty Handling*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah guna terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera di segala aspek baik kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak (Melliana & Zain, 2013). Menurut Portes 1976 (dalam Digdowiseiso, 2019) bahwa, pembangunan merupakan bentuk transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Akan tetapi istilah pembangunan lebih sering diartikan secara sempit hanya sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik saja (Marisa, 2021). Adanya kesalahan pemaknaan pembangunan yang sempit ini, mengakibatkan adanya distorsi dalam mempraktikkan model-model pembangunan selama ini (Harmawati & Lubis, 2018). Adanya model pembangunan yang diimplementasikan, secara tidak langsung tidak menggambarkan secara luas terhadap permasalahan berbagai bidang dan tidak mampu mencukupi segala kebutuhan masyarakat (Marisa, 2021). Kebutuhan yang dialihkan pada bidang tertentu akan menjadi penyebab perubahan dan pergerakan masyarakat akan terhambat dalam proses pembangunan.

Adanya kesalahan tersebut, maka perlu adanya perubahan paradigma agar proses pembangunan bisa menghasilkan pemerataan. Pergeseran paradigma

pembangunan harus memilih antara pemerataan, pertumbuhan, dan *sustainable*. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut harus seimbang (Sartika, 2019). Pembangunan seimbang adalah terlaksananya pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah/daerah yang beragam (Rahmah, 2020). Pembangunan seimbang menurut Murty (2000) adalah: (1) tidak mewajibkan adanya keseragaman pembangunan antar daerah; (2) tidak mewajibkan keseragaman capaian tingkat industrialisasi daerah. (3) tidak mewajibkan keseragaman pola dan struktur ekonomi daerah; (4) tidak mewajibkan keseragaman tingkat pemenuhan kebutuhan dasar setiap daerah (Iqbal & Pohan, 2021). Komitmen pembangunan makro yang harus dicapai telah bergeser menjadi pendekatan lokal dan regional. Prioritas makro pembangunan telah menimbulkan ketidak seimbangan pembangunan seperti menajamnya disparitas spasial, kesenjangan antara desa dan kota dan daerah dengan daerah. (Iqbal & Pohan, 2021).

Paradigma baru dalam pembangunan lebih mengarah pada pengembangan daerah (regional dan lokal). Pembangunan daerah ialah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya

serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah (Senduk *et al.*, 2019). Terdapat tiga syarat percepatan pengembangan wilayah: (1) mengerahkan dan menggerakkan potensi dan sumberdaya lokal; (2) partisipasi publik dalam pembangunan dan usaha memenuhi standar hidup minimum masyarakat; (3) mempraktekkan “*participatory planning*” untuk menciptakan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat untuk pembangunan berkesinambungan (Ahmad Yunani, n.d.).

Untuk mewujudkan pembangunan di masa otonomi daerah sangat memerlukan manajemen pembangunan daerah. Prinsip otonomi nyata adalah, untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas kewenangan dan kewajiban sebenarnya telah ada dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah yang ada. (Alberth & Far, 2022). Dalam perkembangannya pelaksanaan otonomi daerah seringkali menghadapi kendala. Apalagi Otonomi daerah sering diartikan sebagai keleluasaan daerah dalam sudut pandang politik semata. sehingga capaian pembangunan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan (Diskresi & Otonomi, 2010). Salah satu tahapan dalam pembangunan daerah adalah. Dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong optimalisasi pelaksanaan perencanaan sehingga dapat menciptakan

pembangunan yang berkelanjutan. Disamping perencanaan, yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan daerah.

Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Raharjo, (2011). pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan baik, apabila mendapatkan dukungan dari kemampuan keuangan memadai, dan alokasi yang adil dan merata, serta memiliki indikator yang jelas. Anggaran dapat dijadikan pedoman bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Pada instansi pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapatkan persetujuan dari oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karenanya, semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrument kebijakan yang penting dalam melaksanakan otonomi daerah. APBD dijadikan drbagai pedoman dalam mendistribusikan anggaran daerah.

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk untuk pembiayaan dan belanja daerah dalam pembangunan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD mempunyai pengaruh yang besar terhadap APBD. Semakin besar APBD akan semakin meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan.

Menurut Mudrajad terdapat indikator penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur mebnangusan suatu daerah yaitu apakah yang terjadi pada tingkat kemiskinan ketimpangan dalam berbagai bidang. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan antara satu dan lainnya. Sebab tingginya angka kemiskinan adalah banyaknya angka pengangguran yang berdampak pada kesenjangan diberbagai bidang. Apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut mendapatkan masalah makan akan berdampak pada faktor lainnya.

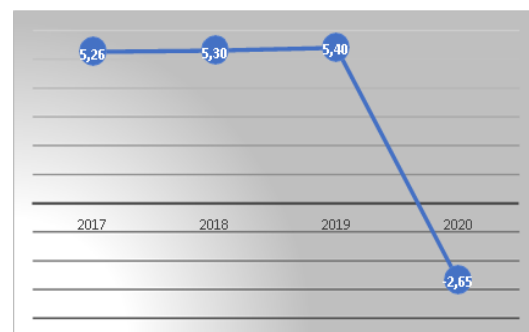
Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa (Indriyani, 2016). Setiap Negara/Daerah akan berusaha keras mengoptimalkan mencapai pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan (Jonaidi, 2012). Syarat utama dalam menurunkan angka kemiskinan adalah tumbuhnya perekonomian. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara, adanya pertumbuhan seringkali diikuti dengan meningkatnya meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. (Jonaidi, 2012). Sebagai mana yang terjadi pada Provinsi Jawa tengah. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa tengah, dapat dinilai belum dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat terlebih pada wilayah pedesaan. Pembangunan yang dilaksanakan masih menciptakan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan

perkotaan. Kesenjangan ini diakibatkan adanya ketidak jelasan dan distorsi pembangunan yang lebih berpihak kepada ekonomi perkotaan yang mengakibatkan timbulnya daerah tertinggal dan terbelakang. (Wahidah et al., 2022).

Pertumbuhan ekonominya Di Provinsi Jawa Tengah, secara statistik terus mengalami peningkatan. Namun, adanya pandemi Corona virus-19 telah memberikan dampak yang serius pada laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2020. Pada rentang Tahun 2017-19 ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan namun memasuki akhir tahun 2019-2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode 2017-2020

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2017-2020

Sumber: (diadaptasi dari Kawuri, 2021)



Dari data diatas diperoleh Informasi bahwa. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,26% pada tahun 2017. Kemudian pada Tahun 2018 tumbuh 5,30% dan Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,40%. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 terdepresi sebesar - 2.65% (Kawuri, 2021)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tercatat bahwa, pada Maret 2021 jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menngkat sebesar 128,85 ribu juwa menadi 4,1 juta jiwa. Seperti dikutip dari detik.com bahwa kemiskinan ekstrim di Jawa Tengan bertambah dari 5 menjadi 19. Kenaikan ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti adanya pandemi Covid-19 dan kenaikan harga. (detik.com,2022). Adapun data 10 Kabupaten termiskin di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 10 Kabupaten dengan Angka Kemiskinan Tertinggi di Jawa Tengah pada Maret 2021

No	Kabupate n	Persentase Jumlah Penduduk Miskin/ Tahun		
		20 19	2020	2021
1.	Kebumen	16,82%	17,59 %	17,83 %
2.	Wonosobo	16,63%	17,36 %	17,67 %
3.	Brebes	16,22%	17,03 %	17,43 %
4.	Pemalang	15,41%	16,02 %	16,56 %
5.	Purbalingg a	15,03%	15,90 %	16,24 %
6.	Banjarneg ara	14,76%	15,64 %	16,23 %
7.	Rembang	14,95%	15,60 %	15,80 %
8.	Sragen	12,79%	13,38 %	13,83 %
9.	Klaten	12,28%	12,89 %	13,49 %
10.	Banyumas	12,53%	13,26 %	13,66 %

Sumber: (BPS Jawa Tengah, 2021).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kebumen menempati kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut juga diketahui adanya kecenderungan peningkatan persentasi angka kemiskinan di setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS), angka penduduk miskain di Kabupaten Kebumen pada Maret 2021 meningkat sebanyak 1.83 ribu jiwa atau bertambah 17.83 % dan pada Maret 2021 jiwa menjadi 212.92 atau 17.59% . Jumlah Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 11.79% yang melebihi angka kemiskinan di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan APBD memiliki posisi sentral dalam mengendalikan perekonomian daerah. Melalui program-program yang telah digariskan dalam APBD maka akan berdampak pada: (1) terjadi pembangunan di berbagai sektor; (2) adap mempengaruhi perencanaan sektor swasta; (3) mempengaruhi perdagangan internasional (4) sebagai politik anggaran untuk mengurangi angka kemiskinan.

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis menggunakan literatur review yang di dasarkan pada data dan sumber referensi yang relevan. Penelitian ini berdasarkan pemaparan data-data diatas maka analisis yang berfokus pada bagaimana rasio APBD dalam meningkatkan perkonomian di Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Artikel ini bertujuan utuk mendeskripsikan Rasio APBD dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen tahun 2022. (Creswell, 2017).

Landasan Teori

Pembangunan daerah

Pembangunan daerah merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan daerah yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Analisis perencanaan pembangunan dibagi menjadi analisis: (1) kekuatan pendorong pembangunan desa yang kurang berkembang (2) perencanaan skenario yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (3) strategi yang diambil pada setiap skenario yang akan terjadi di masa yang akan datang (Ratnadila, 2018).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan program anggaran dan belanja jangka pendek daerah yang dapat mengendalikan ekonomi daerah. Dampak APBD terhadap perekonomian daerah yaitu

a. Dampak pembangunan di berbagai sektor

APBD bertujuan menstabilkan ekonomi daerah, meningkatkan perekonomian dan pemerataan pendapatan (Norsain & Rofik, 2022).

b. Mempengaruhi perencanaan sektor swasta

c. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta

APBD menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah (Norsain & Rofik, 2022).

d. Mempengaruhi perdagangan internasional

Kebijakan fiskal seperti pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk

melindungi produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional (Norsain & Rofik, 2022).

e. Sebagai alat politik fiskal

Pemerintah daerah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi yang disebut dengan kebijakan fiskal (Norsain & Rofik, 2022).

2. Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Rasio keuangan untuk menyederhakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos-pos keuangan.

Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian....Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal PAD

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Keserasian Belanja

a. Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebumen merupakan salah satu kabupaten dengan kategori penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah. dengan jumlah warga miskin terbanyak. Dalam periode 2018-2020 angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan. Bersumber pada informasi Badan Pusat Statistik (BPS), angka penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada Maret 2021 meningkat sebanyak 1.83 ribu jiwa atau bertambah 17.83 % dan pada Maret 2021 jiwa menjadi 212.92 atau 17.59% . Jumlah Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 11.79% yang melebihi angka kemiskinan di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa. Setiap Daerah akan berusaha keras mengoptimalkan mencapai pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Syarat utama dalam menurunkan angka kemiskinan adalah tumbuhnya perekonomian. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi seringkali diikuti

dengan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan dan mempunyai posisi sentral untuk mengendalikan perekonomian daerah melalui program-program yang telah digariskan agar berdampak pada perekonomian. APBD menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, sebagaimana selalu terjadi dalam pengelolaan keuangan publik, selalu terjadi kendala penganggaran (*budget constraint*), yang mana banyaknya kebutuhan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, prioritas belanja dan perencanaan yang baik dapat menjadi kunci untuk menyalahi kendala penganggaran. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan analisis tentang kesehatan keuangan APBD Kabupaten Kebumen yang mampu memberikan

informasi yang berguna dalam memotret kondisi keuangan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang analisis rasio keuangan APBD Tahun 2020 yang dibatasi hanya pada analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio

keseerasian belanja tidak langsung terhadap total belanja dan rasio keseerasian belanja langsung terhadap total belanja. Berdasarkan rasio keuangan tersebut maka dapat disimpulkan tentang kualitas dan tingkat kesehatan APBD. Analisis ini didasarkan pada data sekunder berupa data ringkasan APBD 2020.

Tabel 2. Data realisasi APBD Kebumen 2018-2022

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan APBD		
	2018	2019	2020
A. Pendapatan Daerah	2,639,732,829,000	2,805,865,491,000	2,878,556,768,000
1. Pendapatan Asli Daerah	351,965,057,000	401,172,210,000	417,693,691,000
1.1 Pajak Daerah	96,775,593,000	100,086,758,000	110,640,014,000
1.2 Retribusi Daerah	37,339,859,000	29,568,538,000	33,639,811,000
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,734,495,000	12,920,000,000	13,030,679,000
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	208,115,110,000	258,596,914,000	260,383,187,000
2. Dana Perimbangan	1,654,135,304,000	1,723,809,820,000	1,748,404,196,000
2.1 Bagi Hasil Pajak	28,209,494,000	27,801,248,000	29,360,052,000
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,417,932,000	2,313,470,000	1,153,902,000
2.3 Dana Alokasi Umum	1,234,003,169,000	1,274,201,163,000	1,322,910,412,000
2.4 Dana Alokasi Khusus	390,504,709,000	419,493,939,000	39,497,830,000
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	633,632,468,000	680,883,461,000	712,458,881,000

B. Pembiayaan Daerah	225,675,495,000	164,603,902,000	165,500,000,000
Jumlah	2,865,408,324,000	2,970,469,393,000	3,044,056,768,000
Jenis Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran APBD		
	2018	2019	2020
A. Belanja Tidak Langsung	1,676,515,529,000	1,707,700,082,000	1,888,463,325,000
1. Belanja Pegawai	1,094,190,721,000	1,092,633,852,000	1,163,648,534,000
2. Belanja Bunga	0	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0	0
4. Belanja Hibah	30,763,259,000	31,299,036,000	86,827,718,000
5. Belanja Bantuan Sosial	45,356,182,000	20,742,420,000	29,467,249,000
6. Belanja Bagi Hasil	14,048,214,000	15,502,510,000	13,696,177,000
7. Belanja Bantuan Keuangan	492,152,153,000	547,521,693,000	593,823,647,000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	5,000,000	571,000	1,000,000
B. Belanja Langsung	975,539,649,000	1,101,849,363,000	1,145,293,443,000
1. Belanja Pegawai	61,887,511,000	94,148,451,000	108,277,118,000
2. Belanja Barang dan Jasa	543,647,761,000	641,860,118,000	692,333,376,000
3. Belanja Modal	370,004,377,000	365,840,794,000	344,682,949,000
C. Pembiayaan Daerah	213,353,146,000	212,137,918,000	10,300,000,000
Jumlah Pengeluaran	2,865,408,324,000	3,021,687,363,000	3,044,056,768,000

Sumber: (data skunder jateng.bps.go.id,2020)

Dari tabel data realisasi APBD Kebumen 2018-2022 dapat diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan penerimaan pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen setiap tahun. Sumber pendapatan terbesar APBD Kabupaten Kebumen adalah dari dana perimbangan daerah dan

Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara untuk pengeluaran belanja daerah juga mengalami peningkatan. Akan tetapi dari data tersebut diperoleh informasi pengeluaran terbesar adalah untuk belanja pegawai. Sementara untuk belanja modal masih sangat kecil. Untuk itu akan

dilakukan analisis rasio keuangan terhadap realisasi APBD Kabupaten Kebumen periode anggaran Tahun 2020.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{417,693,691,000}{3.466.294.438.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio kemandirian} = 0,01\%$$

Dari perhitungan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa kemandirian APBD Kabupaten Kebumen masih sangat kecil sekali. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan propinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah. Artinya sumber pendapatan Kabupaten kebumen masih sangat bergantung pada keuangan bantuan keuangan dari pusat dan propinsi.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{417,693,691,000}{2,878,556,768,000} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = 14,51\%$$

Dari perhitungan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kabupaten Kebumen masih sangat

kecil sekali. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rumus yang menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehingga Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Artinya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan otonomi daerah masih sangat besar.

3. Rasio Keserasian Belanja

a. Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{1,888,463,325,000}{3,044,056,768,000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Keserasian} = 62,03\%$$

b. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{1,145,293,443,000}{3,044,056,768,000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Keserasian} = 37,62\%$$

Proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian

anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi output kegiatan.

Artinya, rasio keserasian belanja APBD Kabupaten Kebumen belum seimbang dengan keuangan daerah sebagian besar lebih banyak dibelanjakan untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Sehingga output pelaksanaan kegiatan belum dapat berpengaruh terhadap upaya untuk meningkatkan perekonomian yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat berpengaruh dalam perdagangan secara lokal dan berimbas pada skema kerjasama antar swasta. Tidak hanya itu, proses pembangunan yang bersifat publik tidak mampu direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi laju perubahan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

D. KESIMPULAN

Sumber pendapatan pada APBD Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung pada keuangan bantuan keuangan dari pusat dan provinsi sehingga kemandirian APBD Kabupaten Kebumen masih sangat kecil. Campur tangan

pemerintah pusat dalam aktivitas pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan otonomi daerah masih sangat besar. Belanja APBD Kabupaten Kebumen belum proporsional. Keuangan daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar lebih banyak dibelanjakan untuk pengeluaran belanja operasional yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Output pelaksanaan kegiatan belum dapat berpengaruh secara signifikan terhadap upaya untuk meningkatkan perekonomian yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian secara tidak langsung dapat berimbas pada program-program yang tidak dapat direalisasikan di Kabupaten Kebumen seperti terjadi pada pembangunan di berbagai sektor, dapat mempengaruhi perencanaan sektor swasta dan mempengaruhi perdagangan internasional

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Raharjo, (2011), *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmad Yunani. (n.d.). *Isu-Isu Perencanaan Pembangunan (Teori dan Praktek)*.
- Alberth, R., & Far, F. (2022). *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional*. 11(1).
- Creswell, J. W. (2017). *Understanding mixed methods research. In Qualitative Inquiry and Research*

- Design: Choosing Among Five Approaches* (Vol. 11, Issue 2, pp. 1–19).
<http://www.amazon.com/dp/1412916070>
- Digdowniseiso. (2019). *Teori Pembangunan Daerah*.
- Diskresi, A., & Otonomi, E. (2010). *Daftar Isi Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah*. 23(2).
- Harmawati, Y., & Lubis, B. P. M. (2018). Warga Negara Dan Masalah Kontemporer Dalam Paradigma Pembangunan. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6, 6–7.
- Indriyani, S. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2).
<https://doi.org/10.35137/jmbk.v4i2.37>
- Iqbal, M., & Pohan, M. H. (2021). *Kajian Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2015-2020*. 21(2), 161–168.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Kajian Ekonomi*, 1(April), 140–164.
- Kawuri, R. (2021). *Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Industri Pariwisata Jawa Tengah*.
- Marisa. (2021). Peran Camat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal*, 1(1), 1–7.
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(2), 237–242.
<http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.4844>
- Norsain, N., & Rofik, M. (2022). Apakah Kinerja Keuangan Daerah Menggambarkan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 20(2), 405–414.
<https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.354>
- Rahmah, I. M. M. (2020). Dikotomi Keruangan Wilayah: Karakteristik Wilayah dan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jaur (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 3(2), 154–165.
<https://doi.org/10.31289/jaur.v3i2.3142>
- Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 12(2), 111–128.
<https://doi.org/10.33378/jppik.v12i2.104>
- Sartika, I. dan G. (2019). *Analisis Potensi Wilayah & Daerah* (Issue 3).
- Senduk, F., Engka, D. S. M., & Kawung, G. V. . (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 20(2), 45–61.
- Sony, Y. (2005). Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan

Pertanggungjawaban APBD.
Wahidah, N. R., Anggraini, K., & Desthiani, U. (2022). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Ekonomi Pedesaan Di Baduy Banten. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 36.
<https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18707>

Sumber Internet

<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html> Access Time: October 10, 2022, 9:46 pm.

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6023213/tahun-lalu-cuma-5-kini-kemiskinan-ekstrem-di-jateng-tambah-jadi-19-daerah>.

<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/23.profil-kabupaten-kebumen-2013>

<https://jateng.bps.go.id/indicator/13/1211/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kebumen-menurut-jenis-penerimaan.html>.